

BAB VII

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI TEORETIK

Dalam bab ini dikemukakan *pertama*, kesimpulan hasil penelitian tentang pasivitas politik elit organisasi pemuda di Kota Kendari. *Kedua*, implikasi teoritik dengan hasil analisis dan pembahasan berdasarkan hasil temuan di lapangan pada lokasi penelitian.

Kesimpulan

Tujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan dan memahami pasivitas politik elit organisasi pemuda yang bersponsor negara dan kondisi situasional yang mempengaruhi pasivitas politik elit tersebut di Kota Kendari.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Data dan informasi yang diperlukan, khususnya data primer diperoleh melalui wawancara dengan responden dan informan penelitian. Sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan melalui penelusuran dokumen-dokumen pada instansi-instansi terkait, juga dengan studi kepustakaan melalui buku-buku, majalah-majalah/ jurnal dan surat kabar. Berpegang pada prinsip penelitian kualitatif, maka

pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data dilakukan secara bersamaan selama proses penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian tentang partisipasi politik generasi muda OKP di daerah Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

Pertama, berdasarkan data yang dikemukakan pada bab V, secara sepintas generasi muda di dalam OKP terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan. Namun menurut pengamatan penulis, pola keterlibatan mereka ini bersifat pasif, karena aktivitas yang dilakukan terkait dengan mentaati, menerima dan melaksanakan begitu saja setiap kebijakan yang ada, walaupun kebijakan tersebut jelas-jelas tidak sesuai dengan aturan yang ada. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kasus/ masalah yang sampai dengan saat ini belum ada titik akhirnya seperti kasus pemilihan walikota, Penyalahgunaan dana JPS, proyek-proyek bermasalah, persoalan pendidikan, penerimaan PNS yang sarat dengan KKN dan masih banyak lagi kasus lain. Kesemua masalah tidak mendapat perhatian yang serius dari masyarakat khususnya generasi muda di dalam OKP. Disini mereka lebih mengutamakan urusan organisasi, melakukan lobby dan mencari koneksi untuk kepentingan mereka. Jadi keterlibatan mereka dalam organisasi (OKP) hanya sebagai batu

loncatan, sehingga fungsi artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan komunikasi politik sebagaimana tuntutan dari fungsi kelompok kepentingan kurang tampak atau bahkan tidak ada sama sekali.

Kedua, dari gambaran di atas, menurut penulis ada beberapa hal yang menyebabkan partisipasi politik pasif generasi muda Kota Kendari, yakni;

citri diri birokrasi. Disini pemerintah mempunyai persepsi bahwa rakyat itu tidak tahu apa-apa alias bodoh dan oleh karena itu masih perlu di didik, dilindungi dan dibantu. Dalam konteks ini, birokrasi mempunyai persepsi diri sebagai pelindung atau pengayom, pemurah, dan baik hati terhadap rakyatnya. Oleh karena persepsi tersebut pemerintah Indonesia, khususnya Kota Kendari merasa bahwa segala pembangunan dan perubahan yang pantas melakukan adalah pemerintah. Karena semua merupakan hasil usaha pemerintah, maka sudah sewajarnya masyarakat, khususnya generasi muda harus tunduk dan loyal kepada pemerintah.

Jadi dalam konteks seperti ini adalah sulit untuk mengharapkan adanya partisipasi politik rakyat yang mandiri. Akibatnya partisipasi masyarakat khususnya generasi muda OKP

pada kehidupan politiknya hanya akan ada jika tersedia ransangan bantuan dari pemerintah.

Faktor sosial ekonomi. Kondisi sosial ekonomi generasi muda OKP di Kota Kendari sangat berpengaruh terhadap partisipasinya di dalam politik baik secara individual maupun secara institusional. Berdasarkan hasil penelitian keadaan sosial ekonomi generasi muda OKP yang terlibat dalam politik kondisi perekonomian mereka menengah ke bawah. Oleh karena itu sangat sulit mengharapkan keterlibatan aktif mereka dalam politik karena generasi muda OKP Kota Kendari akan lebih mementingkan pemenuhan kebutuhan pokoknya terlebih dahulu baru terlibat secara aktif dalam kegiatan politik.

Tidak berfungsinya partai politik. di Kota Kendari, partai politik, organisasi kepemudaan dan organisasi sosial umumnya hampir secara penuh dikendalikan ruang geraknya oleh pemerintah Kota Kendari. Hal ini dapat dilihat dengan adanya berbagai peraturan yang dikeluarkan pemerintah Kota Kendari mengenai kepemudaan dan organisasi-organisasi yang ada di Kota Kendari.

Kondisi serta tekanan yang dilakukan pemerintah Tekanan yang dilakukan pemerintah disini adalah ; tekanan yang dilakukan oleh birokrasi dan tekanan yang dilakukan oleh ABRI.

Tekanan yang dilakukan oleh birokrasi, Hal ini dilakukan dengan jalan mengontrol secara langsung rekrutmen pengurus-pengurus Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), siapa yang akan menjadi pimpinan OKP, membentuk induk organisasi bagi organisasi kepemudaan dan sekaligus mengawasi jalannya organisasi tersebut, sehingga partisipasi politik generasi muda OKP hanya terbuka bagi mereka yang menunjukkan loyalitas kepada pemerintah setempat.

Tekanan yang dilakukan oleh ABRI, faktor keterlibatan ABRI yang begitu dominan di dalam politik sangat berperan terhadap kurangnya partisipasi masyarakat khususnya generasi muda OKP dalam politik. Hal ini dapat dilihat melalui kontrol keamanan (ABRI) terhadap ruang publik, dengan cara melakukan sensor, pembredelan pelarangan serta pencekalan berbicara dan demonstrasi. Dan sebagai akibatnya, masyarakat khususnya generasi muda akan dipaksa untuk tetap loyal atau setidaknya pasif terhadap problematika sosial dan politik yang terjadi di Kota Kendari.

Ketiga, selain itu pemerintah Kota Kendari menerapkan depolitisasi yang sangat terhadap institusi politik dan institusi pemuda yang ada demi untuk kesuksesan pembangunan. Usaha *depolitisasi* ini sangat sukses; terbukti dari kehidupan masyarakat

kota Kendari yang cenderung tidak mau melakukan partisipasi aktif dalam kehidupan politik.

Depolitisasi ini dilakukan dengan berbagai cara:

- 1). Dengan mewujudkan konsep " massa mengambang " atau floating mass. Dengan konsep seperti ini, kontrol pemerintah Kota Kendari terhadap organisasi kepemudaan, organisasi sosial dan partai politik akan semakin gampang dilakukan.
- 2). Dengan mewujudkan *monoloyalitas* terhadap semua pegawai negeri.
- 3). Dengan *emaskulasi* partai politik dan organisasi kepemudaan yang ada. Hal ini dilakukan dengan dua macam cara, yaitu dengan jalan melakukan " regrouping" atau penyederhanaan sistem kepartaian dan organisasi kepemudaan serta mengontrol *rekrutmen* pimpinan utama partai politik dan organisasi kepemudaan sehingga keduanya mempunyai pimpinan yang akomodatif dengan pemerintah Kota Kendari. Akibat pola rekrutmen seperti ini menyebabkan; (1). Generasi muda yang ditentukan oleh pemerintah tersebut akan bertindak sesuai dengan kehendak pemerintah.)2). Tidak terlaksananya kontrol terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. 3). Generasi muda yang lain merasa dirugikan dengan pola

rekrutmen seperti ini dan akan cenderung bertindak pasif bahkan bersikap acuh tak acuh terhadap permasalahan yang terjadi.

Keempat, dengan melihat kondisi politik di Kota Kendari, maka menurut penulis partisipasi politik generasi muda OKP sebagai partisipasi yang tidak lain dari pada mobilisasi generasi muda untuk memperlihatkan dukungan terhadap pemerintah, yang salah satu bentuknya diwujudkan dengan adanya kebulatan tekad, ataupun partisipasi di dalam mengimplementasikan kebijaksanaan yang telah dirumuskan oleh pemerintah Kota Kendari.

Kelima, dalam mengontrol generasi muda OKP, pemerintah/ birokrasi melakukan tekanan dengan jalan pengetatan sistem politik formal. Di mana pemerintah membentuk Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) sebagai induk organisasi bagi organisasi kepemudaan dan sekaligus mengawasi jalannya organisasi tersebut, sehingga generasi muda di dalam politik menjadi pasif dan hanya terbuka bagi mereka yang menunjukkan loyalitas kepada struktur kekuasaan. Hal lain yang berhubungan dengan pengawasan birokrasi ini adalah kenyataan bahwa lembaga birokrasi/ pemerintah juga mengontrol secara langsung rekrutmen pengurus-pengurus organisasi yang ada di Kota Kendari, siapa yang akan menjadi

pimpinan, terutama ketua-ketua OKP, secara langsung atau tidak langsung di kontrol oleh pemerintah setempat dan diatur secara resmi dalam berbagai aturan. Dalam beberapa hal, upaya pengaturan tersebut dibuat sekedar melukiskan kehendak pemerintah dan tidak selalu mengikuti perkembangan yang obyektif.

Implikasi Teoritik

Dari deskripsi singkat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa implikasi dari semua karakteristik budaya politik seperti yang digambarkan di atas adalah, kekuasaan menjadi tidak terkontrol, bahkan terakumulasi sedemikian rupa, sehingga negara menjadi yang paling kuat dan peluang munculnya civil society menjadi sangat terbatas, apalagi dengan adanya proses pembentukan budaya politik yang dilakukan penguasa melalui sosialisasi atau pendidikan politik yang bersifat doktriner. Kecenderungan penguasa kita dalam menanam nilai-nilai dan keyakinan politik akan menjadikan masyarakat menjadi obyek dari kekuasaan.

Selain itu generasi muda di produksi sebagai floating mass (masa mengambang) di mana generasi muda bukannya didekatkan pada realitas kehidupan politik yang nyata, namun malah dijauhkan

darinya. Para pemuda akhirnya mengalami pengalaman yang sama dengan massa politik di pedesaan semenjak pemberlakuan UU No. 3/1975 yang berisi kebijakan massa mengambang yaitu disibukkan dengan mobilisasi pembangunan dan dijauhkan dari realitas politik sebagaimana telah dibuktikan oleh sejarah dua dasa warsa pelaksanaan UU ini, hasil yang kita lihat pun lebih berupa "pembodohan politik" daripada "pencerdasan politik" dalam hal ini generasi muda tidak diajak berpikir dan memilih posisi peran politik secara dewasa; dan sebaliknya mengalami "pembonsaian" secara politik.

Akhirnya yang dapat diharapkan adalah terjadinya skenario Ralf Dahrendorf tatkala ia menggambarkan revolusi yang menghancurkan komunisme di eropa timur. Yakni: dampak pembodohan politik dan pengekangan aspirasi rakyat itu akan membawa akibat atau mendorong pengembangan civil society dan akhirnya menggoyang segala hambatan struktural yang di kreasi negara selama ini.

Proses penggoyangan ini terbangun oleh bangkitnya gerakan sosial, yang digambarkan melalui bangkitnya "kelas menengah politik", yakni anggota komunitas terdidik di perkotaan yang menjadikan kritisisme sebagai basis politik mereka. Kelas menengah

politik ini membangun daya tawarnya melalui intelektualitas dan organisasi politik.

Kelas menengah politik itulah yang dalam tujuh atau delapan tahun terakhir memperlihatkan gejala politisasi dan menjadi lebih artikulatif. Mereka membawa wacana yang sangat beragam dan mengagendakan demokratisasi sebagai target gerakan. Bentuk artikulasi mereka terutama terwadahi dalam organisasi non-pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Selain itu, mereka juga mengartikulasikan desakan kearah demokratisasi melalui organisasi politis. Misalnya dalam bentuk partai politik baru seperti ; Partai Rakyat Demokratik (PRD) dibawah Budiman Sudjatmiko, Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI) di bawah Sri Bintang Pamungkas. Sedangkan artikulasi politik non-partai diwakili oleh lahirnya Serikat Buruh Sejahterah Indonesia, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP).⁷⁹

Politisi gerakan sosial serupa juga terlihat di kalangan mahasiswa, dimana ditandai dengan munculnya politisi melalui pelbagai komite aksi. Dalam konteks seperti ini, kritisisme dan

⁷⁹ Lihat Eep Saefulloh Fatah, " Partai Politik Baru dan Reformasi Sistem Kepartaian: Catatan Reflektif untuk 1996 ", dalam *Profil Indonesia*, Jurnal Tahunan CIDES, No. 3, 1997, hal. 91 ff.

radikalisme politik kemudian terlihat secara semakin tegas di kalangan mahasiswa.

Kesemua fakta yang terjadi di atas adalah ekses dari pendidikan politik Orde Baru, di mana pendidikan politik dijalankan secara tertutup dan kurang dialogis. Karakter pendidikan politik semacam ini merupakan lahan yang subur bagi tumbuhnya ketidakpuasan dan kekecewaan politik di kalangan masyarakat khususnya generasi muda. Ketika kekecewaan ini makin menggumpal, masyarakat khususnya generasi muda mencari alternatif pencerdasan politik yang lain. Hasil akhirnya tumbuh sebuah komunitas masyarakat khususnya generasi muda yang tidak saja memiliki pengetahuan yang cukup, melainkan juga kritis dan curiga pada pelbagai bentuk kemapanan.

Di samping itu pembangunan politik Orde Baru telah ikut menumbuhkan generasi muda yang berpikir, di mana mereka selalu mempertanyakan tentang keadilan akibat politik pembangunan Orde Baru sehingga mereka begitu aktif melakukan studi, turun ke jalan dan meneriakan perlunya demokrasi ditumbuhkan.

Klimaks dari kesemuanya itu adalah menggejalanya amuk massa semenjak pertengahan tahun 1996, dimulai oleh kerusuhan besar di Jakarta pada tanggal 27 Juli 1996. Kerusuhan yang

memakan korban besar ini kemudian diikuti oleh terjadinya peristiwa sejenis di pelbagai tempat di Indonesia. Menurut data Litbang Redaksi *Republika*, sepanjang tahun 1997 telah terjadi 64 kasus amuk massa dengan isu yang berkembang meluas dari dimensi sosial di tahun 1996 ke dimensi politik.⁸⁰

Maraknya amuk massa ini memperlihatkan terjadinya radikalisasi rakyat dalam bentuk peningkatan aktivitas protes sosial dan politik secara signifikan atau dalam batas tertentu, telah terjadi perubahan resistensi rakyat berhadapan dengan situasi sosio-ekonomi-politik, sikap aparatur, dan kebijakan pemerintah. Inilah yang kemudian disebut oleh sejumlah kalangan sebagai fenomena menguatnya gugatan atas legitimasi pemerintah Orde Baru.

⁸⁰ Lihat Eep Saefulloh Fatah, et. al., "Amuk Massa 1997 dan Delegitimasi Simbolik", *Republika*, 30 Desember 1997.



DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Abar, A. Zaini, *Beberapa Aspek Pembangunan Orde Baru*, Ramadhani, Solo, 1990.
- Abdullah, Taufik, *Pemuda dan Perubahan Sosial*, Penerbit, LP3ES, Jakarta, 1982.
- Alfian, *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*, Penerbit, Gramedia, Jakarta, 1982.
- Altbach, G. Phillip (ed.), *Politik dan Mahasiswa ; Perspektif dan Kecenderungan Masa Kini*, Penerbit, Gramedia, Jakarta, 1988.
- Asfar, Muhammad, "Perilaku Politik Pemuda Perkotaan : Kasus Surabaya", dalam: *Analisis CSIS*, Tahun XXVI, No. 2, Maret-April, 1997.
- , "Pergeseran Otoritas Kepemimpinan Politik Kiai", dalam: *Jurnal Ilmu Politik*, No. 17 (1997), Penerbit, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Almond, A. Gabriel dan Sidney Verba, *Budaya Politik; Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*, Penerbit, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Amal, Ichlasur, " Birokrasi Hubungan Pusat-Daerah: Dilema Pembangunan dan Ketergantungan ", dalam: *Percikan Pemikiran Fisipol UGM tentang Pembangunan*, Fisipol UGM, Yogyakarta, 1990.
- Apter, E. David, *Pengantar Analisa Politik*, Penerbit, LP3ES, Jakarta, 1985.
- Amirin, Tatang M., *Menyusun Rencana Penelitian*, Penerbit, Rajawali Press, Jakarta, 1986.

- Babasari, " Massa Mengambang dan Partisipasinya dalam Pembangunan Nasional ", dalam: *Analisis CSIS*, Jakarta, 1985.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Sulawesi Tenggara, *Sulawesi Tenggara Dalam Angka*, Penerbit. CV. Eka Hasta Jaya, Sulawesi Tenggara, 1998.
- Batubara, Cosmas, *Sikap dan Tanggung Jawab Sebagai Anggota Masyarakat*, Makalah pada Pekan Mahasiswa UKSW, Salah tiga tanggal 12 September 1992.
- Beratha, I. Nyoman, *Desa Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*, Penerbit, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Budiardjo, Miriam, (peny.), *Partisipasi dan Partai Politik*, Penerbit, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1998.
- Crouch, Harold, "Patrimonialism and Military Rule In Indonesia", dalam: *World Politics*, Vol. 31, 1979.
- Dharma, Surya, *Pendidikan Politik di Kalangan Generasi Muda*, Skripsi, IIP, Jakarta, 1986.
- Departemen Penerangan Republik Indonesia, *Garis-Garis Besar Haluan Negara*, Jakarta, 1983.
- Depdikbud, *Pola Dasar Pembinaan Dan Pengembangan Generasi Muda*, Jakarta, 1978.
- Gafar, Affan, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Peñajar, Yogyakarta, 1999.
- Gafur, Abdul, *Kebijaksanaan Nasional Kepemudaan di Indonesia*, Kantor Urusan Pemuda Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Jakarta, 1982.

- Gibson, James, "The Political Consequences Of Intolerance : Cultural Conformity and Political Freedom", dalam: *American Political Science Review*, (Vol. 86, No. 2), 1992.
- Haris, Syamsuddin., "Pembinaan Politik, Demokratisasi dan Pembentukan "Civil Society", Problematika Kepartaian Indonesia di Bawah Orde Baru", dalam: *Jurnal Ilmu Politik*, No. 17, AIPI - Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.
- Hikam, Muhammad A.S, *Politik Kewarganegaraan; Landasan Redemokratisasi di Indonesia*, Penerbit, Erlangga, Jakarta, 1999.
- Hoult, Thomas Ford, *Dictionary of Modern Sociology*, New Jersey; Littlefield, Adams & Co., 1974.
- Huntington, P. Samuel dan Joan M. Nelson, *No Easy Choice : Political Participation In Developing Areas*, (Cambrige: Harvard University Press), 1976.
- Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 1982, Tentang ; *Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda*, Kantor Menteri Muda Urusan Pemuda, Jakarta, 1982.
- Jackson Karl D., *Bureaucratic Polity A Theoretical Framework For The Analysis Of Power and Communication In Indonesia*, Berkeley: University Of California, 1978.
- Kadir, Abdul, "Partisipasi Masyarakat Sebagai Faktor Yang Menentukan Keberhasilan Pembangunan Desa", dalam: *Majalah Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Haluoleo*, No. 1, April, 1995.
- Kartono, Kartini, *Pendidikan Politik; Sebagai Bagian Dari Pendidikan Orang Dewasa*, Penerbit, Mandar Maju, Bandung, 1996.

- Keller, Suzanne, *Penguasa dan Kelompok Elit; Peranan Elit Penentu Dalam Masyarakat Modern*, Zahara D. Noer (Pent.), Jakarta, CV. Rajawali, 1984.
- Korten, David C., *Pembangunan Yang Memihak Rakyat; Kupasan tentang Teori dan Metode Pembangunan*, Lembaga Studi Pembangunan, Jakarta, 1984.
- Kristiadi J., "Pemilu dan Perilaku Pemilih di Indonesia", Dalam: *Prisma*, Penerbit, LP3ES, Jakarta, 1996, No. 3.
- Kurniadi, Edy, *Peranan Pemuda Dalam Pembangunan Politik Indonesia*, Penerbit, Angkasa, Bandung, 1987.
- Lazuardi, Adi, *Pemuda Kontrol Sosial dan Globalisasi*, Merdeka, 22 Agustus 1991.
- Lembaga Penelitian, "Aspirasi Politik dan Perilaku Memilih Pemuda Perkotaan", (hasil Penelitian), Surabaya, University Press, 1992.
- Liddle, William, "Indonesia Democratic Past and Future", dalam: *Comparative Politics*, 1992.
- , *Partisipasi dan Partai Politik di Indonesia pada Awal Orde Baru*, Penerbit, Grafiti Pers, Jakarta, 1992.
- Lipset, Seymour Martin, *Political Man*, Garden City, New York, 1960.
- Mas'ood, Mochtar, dan Colin Mac Andrews (ed.), *Perbandingan Sistem Politik*, Penerbit, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1982.
- Martha, Ahmaddani G., dkk., *Pemuda Indonesia*, Yayasan Sumpah Pemuda, 1984.
- Miles, Matthew dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta, 1992.

- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1997.
- Naning, Ramdlon, *Pendidikan Politik dan Regenerasi*, Penerbit, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- Nashir, Haidar, *Pragmatisme Politik Kaum Elit*, Penerbit, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999.
- Nie, H. Norman dan Sidney Verba, "Political Participation", dalam: *Fred I. Greenstein dan Nelson W. Folsky, Handbook Of Political Science Non Governmental Politics*, Vol. 4, (Addison Wesley Publishing Company), 1975.
- Niel, Robert Van, *Munculnya Elit Modern Indonesia*, Jakarta, Pustaka Jaya, 1984.
- Pangabean, M., *Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda dalam Konteks Pendidikan Nasional*, makalah dalam Simposium Nasional Pendidikan Politik Generasi Muda, Jakarta, 1981.
- Rasjiid, M. Ryaas, *Budaya Politik dan Sosialisasi Politik di Indonesia*, Yayasan Karya Dharma Institut Ilmu Pemerintahan, Jakarta, 1983.
- Rodiyah, Siti dan Nanik Setyowati, *Pendidikan Generasi Muda*, Surabaya Intellectual Club kerjasama dengan LPM IKIP Surabaya, 1996.
- Rukminijati, Tati, Amien Rais, dan Budi Winarno, "Peranan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dalam pembangunan politik; studi kasus di Jawa Barat", dalam: *BPPS - UGM*, 8 (3A), Agustus, 1995.
- Rush, Michael dan Phillip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik*, Terjemahan Kartini Kartono, Rajawali, Jakarta, 1983.

- Saidi, Ridwan, *Islam Pembangunan Politik dan Politik Pembangunan*, Pustaka Panjimas, Jakarta, 1983.
- , *Pemuda Islam dalam Dinamika Politik Bangsa 1925 - 1984*, Penerbit, Rajawali, Jakarta, 1984.
- Saleh, Hasanuddin M., *HMI dan Rekayasa Asas Tunggal Pancasila* ; Kelompok Studi Lingkaran, Yogyakarta, 1996.
- Sanit, Arbi, *Pergolakan Melawan Kekuasaan*, Penerbit, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998.
- , *Reformasi Politik*, Penerbit, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 1998.
- , *Ormas dan Politik*, Penerbit, LSIP, Jakarta, 1995.
- Sarewo, Asrin, *Peran Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Dalam Mendukung Pembangunan di Kotif Kendari; Suatu Tinjauan Sosiologi Pembangunan*, Skripsi, Universitas Haluoleo, Kendari, 1995
- Setiardja, Gunawan, "Ham dan Pendidikan Politik Mahasiswa di Indonesia Kini", dalam: *Kritis* No. 2/ Tahun VII Oktober 1993.
- Simanjuntak, Marsilan, *Pandangan Negara Integralistik*, Penerbit, Graffiti Pers, Jakarta, 1994.
- Soedarsih, *Studi Aspek Konatif Pada Sikap Pelajar Sebagai Pemilih Pemula*, Tesis, Universitas Airlangga, 1997.
- Soekanto, Soerjono, *Teori-Teori Sosiologi Tentang Perubahan Sosial*, Penerbit, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Soetrisno, Loekman, *Menuju Masyarakat Partisipatif*, Penerbit, Kanusius, Yogyakarta, 1995.

- Suhardiman dkk, *Pendidikan Politik Bangsa*, Penerbit, Sinar Harapan, Jakarta, 1984.
- Sumantri, Endang dan Idrus Affandi, *Pembinaan Generasi Muda*, Penerbit, Karunika, Jakarta, 1986.
- Surbakti, Ramlan, *Perbandingan Sistem Politik*, Penerbit, Mecphiso Grafika, Surabaya, 1984.
- , "Pertumbuhan Kota dan Struktur Politik", dalam: *Analisis CSIS*, Tahun XXV, No. 1, Januari-Februari, 1996.
- , *Memahami Ilmu Politik*, Penerbit, PT. Gramedia Widiasarana, Jakarta, 1992.
- , *Birokrasi Berdimensi Kerakyatan*, FISIP - UMM, Malang, 1996
- Widjaya, Albert, *Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi*, Jakarta, LP3ES, 1984.
- Tando, Usman, "Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda; Sebuah Kerangka Acuan", *Majalah Mahasiswa* No. 32. Tahun VI, Nopember 1982.
- Tandjung, Akbar, *Pengembangan Demokrasi Pancasila Sebagai Agenda*, Jawa Pos, 29 Agustus 1991.
- Tarimana, Abdurrauf, *Pembangunan Daerah di Sulawesi Tenggara dan Peranan Pemuda di dalamnya*, Balai Penelitian, Unhalu, Kendari, 1989.
- Thaba, Abdul Azis, *Islam dan Negara; Dalam Politik Orde Baru*, Penerbit, Gema Insani Press, Jakarta, 1996.
- Unga Muh. Ulyun, *Partisipasi Generasi Muda Dalam Pembangunan; Suatu Studi Sosiologi Pembangunan Di Kelurahan Tipulu Kecamatan Kendari Kotamadya Kendari*, Skripsi, Unhalu, Kendari, 1997

Uphoff, Norman, *Farmer's Participation in Project Formulation, design and operation*, Washington ; Cornell University, 1987.

Yusuf, Ramli HM. (editor), *Golkar Abad XXI*, Lembaga Studi Pembangunan Indonesia, Jakarta, 2000

